

# TELISIK FAKTA

## Minta Pertegas Proses Hukum APH, Pelapor Kasus Dugaan Penipuan dan Eksplorasi Anak Desak Transparansi

Udin Komarudin - MESUJI.TELISIKFAKTA.COM

Feb 12, 2026 - 17:52

Surat Tuntutan

NO. 1000/1000/2025/SPKT/Polres Tulang Bawang

Tulang Bawang, 20 Oktober 2025

Ditulis oleh: Udin Komarudin

Nomor: 5644-KPTES/124/002/2025/Polres  
Bawang

Pembelahan/pengembangan Paus  
(pengalih)

1. Tujuan :

- Laporan Polisi Nomor: LP/0/200/2025/SPKT/Polres Tulang Bawang
- Tanggal: 20 Oktober 2025.
- Surat Perintah Tugas Penyekaman Nomor: Sp. Gam / 389 / X / RES. 124 / 2025 / Resim, tanggal 20 Oktober 2025.
- Surat Pernah Penyekaman Nomor: Sp. Lda / 389 / X / RES. 124 / 2025 / Resim, tanggal 20 Oktober 2025.

2. Berdasarkan kahul bermitraan bahwa berdasarkan laporan yang kami terima, sebagian besar korban merupakan penyekaman terhadap penyalahgunaan obat-obatan berbahaya, atau zat-zat berbahaya, atau untuk meracun, meracun, meracun dengannya atau dengan orang lain" setelah transaksi dilakukan dalam Pasal 81 ayat (1) di Buku TBL Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Peraturan Anak, yang berlaku di Buka Bawang, Gedung Aj Bawang Kab Tulang Bawang, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2025 Sejauh pukul 13.00 WIB.

3. Gunakan keperintahannya untuk memberikan laporan resmi, maka kami mengajukan AJAN INSPEKTUR POLISI SATU SHAIKI S.H., M.H setiaji, Pa. Kensi IV Resim, dengan nomer telepon 0821-471-0911 atau disertai ANDREAN SAPUTRA setiaji Penyidik. Funturmu dengan nomer telepon 0822-709-3-6373 jika diperlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses perkara.

4. Diharapkan untuk memahami dan kerjakan kahul atau kesamaanya.

a. H. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TULANG BAWANG  
KASAT RESKRIM  
SELAKU PENYIDIK



NOVARI KURNIAHAN S.T.K. S.I.K. M.H.  
ADMINISTRATOR POLISI NRP 23111123

Tentukan:

1. Kapolda Lampung
2. Dir Reskrim Um Polda Lampung
3. Kapolda Tulang Bawang
4. Pengawas Penyidikan

*Pelapor meminta agar penanganan perkara tersebut dipertegas*

Tulang Bawang – Proses hukum dugaan tindak pidana penipuan dan eksplorasi anak yang ditangani aparat penegak hukum (APH) di wilayah Kabupaten Tulang Bawang kini menjadi sorotan. Pelapor meminta agar penanganan perkara tersebut dipertegas dan dilakukan secara profesional, transparan, serta sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Hal itu merujuk pada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang diterbitkan Polres Tulang Bawang tertanggal 20 Oktober 2025. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa laporan polisi terkait dugaan tindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diterima dan masuk tahap penyelidikan.

Peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Suka Bhakti, Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, pada Senin, 18 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 WIB.

Dalam surat itu pula, penyidik yang ditunjuk untuk menangani perkara adalah AIPTU Suhadi selaku Panit IV Reskrim, dengan didampingi Brigpol Andrean Saputra sebagai penyidik pembantu.

Pelapor berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara maksimal dan serius dalam mengusut perkara tersebut, mengingat kasus yang menyangkut anak merupakan kejahatan serius yang menjadi perhatian publik.

“Kami meminta proses hukum ditegaskan. Jangan sampai perkara ini berjalan lambat atau tidak jelas arahnya. Penanganan kasus perlindungan anak harus menjadi prioritas,” ujar sumber yang mengikuti perkembangan perkara tersebut.

Selain itu, publik juga menaruh harapan agar APH menjunjung tinggi asas profesionalitas, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penetapan tersangka apabila unsur pidananya terpenuhi.

Kasus ini dinilai bukan hanya menyangkut kepentingan individu, tetapi juga menjadi ujian komitmen aparat dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Hingga berita ini diturunkan, proses penyelidikan masih berlangsung. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban serta keluarganya. [Tim]